



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMILU MELALUI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN BONE

Lukman Ansar^{1*}, Tarmizi², Hamzah³, Irfan Amir³, Dandi Wahyudin³

¹Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

*Corresponding Author: lukmanansar04@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk merespons rendahnya tingkat literasi politik dan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilihan umum di Kabupaten Bone. Pendekatan yang digunakan adalah metode partisipatif melalui ceramah interaktif, dialog terbuka, dan simulasi proses pemungutan suara, yang dirancang secara inklusif dan humanis. Tahapan kegiatan dilakukan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pendampingan singkat hingga evaluasi atau umpan balik dari peserta sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 desa di Kabupaten Bone yaitu Desa Lampoko, Desa Parippung, dan Desa Kampuno yang diikuti oleh peserta berjumlah 30 orang setiap desa, sehingga keseluruhan peserta dari 3 desa adalah 90 orang. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai prosedur pemungutan suara, peran lembaga penyelenggara, serta sikap kritis terhadap isu-isu publik seperti politik uang, netralitas aparat, dan penyebaran informasi palsu. Peserta, termasuk pemilih pemula dan kelompok perempuan, menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: Literasi Politik, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Demokratis, Pendidikan Politik, Sosialisasi Pemilu.

Abstract

This community service activity was carried out in response to the low level of political literacy and public understanding of the general election process in Bone Regency. The approach used was a participatory method through interactive lectures, open dialogue, and voting process simulations, designed in an inclusive and humane manner. The activity stages were carried out starting from needs identification, planning, activity implementation, brief mentoring, and

DOI:

10.53491/numbay.v3i2.1914



evaluation or feedback from the socialization participants. This activity was carried out in three villages in Bone Regency: Lampoko Village, Parippung Village, and Kampuno Village, with 30 participants in each village, bringing the total number of participants from the three villages to 90 people. The results of the community service showed a significant increase in participants' understanding of voting procedures, the role of election organizers, and critical attitudes towards public issues such as money politics, neutrality of officials, and the spread of false information. Participants, including first-time voters and women's groups, showed greater enthusiasm and confidence in exercising their right to vote responsibly.

Keywords: *Community Empowerment, Democratic Participation, Election Socialization, Political Literacy, Political Education.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan demokrasi modern. Dalam sistem politik Indonesia, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pemilu menjadi medium utama bagi warga negara untuk mengekspresikan aspirasi, menentukan arah pembangunan, serta menilai akuntabilitas pemimpin (Asshiddiqie, 2010:45). Demokrasi yang sehat, dengan demikian, tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga-lembaga elektoral, tetapi juga pada kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Semakin tinggi tingkat literasi politik masyarakat, semakin besar pula peluang terwujudnya pemilu yang inklusif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat informasi. Rendahnya pemahaman mengenai aturan pemilu, prosedur pencoblosan, peran lembaga penyelenggara, serta pentingnya pengawasan partisipatif sering kali berdampak pada tingginya angka golongan putih (golput) dan rawannya manipulasi informasi politik (Budiardjo, 2008:72-73). Kondisi tersebut diperburuk dengan derasnya arus disinformasi di ruang digital, yang mengaburkan batas antara informasi faktual dan opini yang dimanipulasi. Dalam konteks inilah, sosialisasi pemilu menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan daya kritis dalam menghadapi dinamika politik elektoral.

Kabupaten Bone sebagai salah satu kabupaten besar di Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan dinamika tersebut secara nyata. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat pada beberapa periode pemilu cukup baik, sejumlah survei lokal dan laporan pendampingan menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kendala dalam memahami informasi kepemiluan, seperti pemilih pemula, kelompok perempuan, dan warga di desa-desa terpencil. Akses terhadap informasi politik sering kali bergantung pada

jaringan sosial informal, yang tidak selalu memastikan akurasi informasi. Keterbatasan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh lembaga penyelenggara pemilu, khususnya di wilayah pinggiran, menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak politiknya (Azra, 2010:118). Situasi tersebut menegaskan perlunya intervensi akademik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan literasi politik secara sistematis.

Meskipun berbagai kajian dan program sosialisasi pemilu telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada peningkatan partisipasi secara kuantitatif (Yanur et al., 2025; Sari et al., 2024; Rambe et al., 2023; Kelibay et al., 2023; Telaumbanua et al., 2021) atau penyampaian informasi kepemiluan yang bersifat satu arah dan teknis (Riyadh et al., 2025; Umma & Ahmad, 2025). Kajian-kajian tersebut umumnya belum mengulas secara mendalam bagaimana pendekatan pemberdayaan berbasis dialog dan pengalaman langsung dapat memengaruhi kualitas literasi politik masyarakat, khususnya pada komunitas lokal dengan karakter sosial dan geografis yang khas seperti di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, artikel ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan praktik sosialisasi pemilu yang mengintegrasikan pendekatan humanis, partisipatif, dan kontekstual, serta menganalisis kontribusinya terhadap penguatan literasi politik masyarakat di tingkat akar rumput.

Program sosialisasi pemilu yang dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) menjadi salah satu strategi efektif dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut. Pendekatan pemberdayaan dipilih karena menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran politik. Model pemberdayaan ini sejalan dengan perspektif Paulo Freire yang menekankan pentingnya dialog kritis dalam proses pendidikan masyarakat, di mana peserta didorong untuk memahami struktur sosial yang memengaruhi kehidupannya, termasuk proses politik (Freire, 2007:54-55). Dengan demikian, sosialisasi pemilu tidak hanya menyampaikan informasi teknis seperti tata cara pemungutan suara, tetapi juga membantu masyarakat memahami makna substantif partisipasi dalam sebuah negara demokrasi.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, pendekatan tersebut diwujudkan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pencoblosan. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat dalam dialog dan pengalaman langsung mengenai pentingnya integritas pemilu. Kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, keresahan, maupun persepsi mereka terhadap proses politik, sehingga proses pembelajaran berlangsung dua arah dan lebih bermakna. Pengalaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Bone memiliki antusiasme tinggi untuk memahami pemilu ketika diberikan kesempatan belajar yang ramah, inklusif, dan tidak menggurui.

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi yang kuat dengan mandat tridarma perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam sosialisasi pemilu memperkuat fungsi perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial, yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga menerapkannya secara langsung untuk menjawab kebutuhan

masyarakat. Interaksi antara akademisi dan masyarakat menghasilkan pertukaran pengetahuan yang bersifat reflektif: para peserta memperoleh pemahaman baru tentang demokrasi, sementara akademisi mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai realitas sosial yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi politik masyarakat, tetapi juga memperkaya khazanah akademik tentang strategi pendidikan politik yang efektif.

Pemilihan Kabupaten Bone sebagai lokasi pengabdian bukan tanpa alasan. Selain karena karakteristik sosialnya yang plural dan geografisnya yang luas, Kabupaten Bone memiliki struktur masyarakat yang kuat dalam nilai adat dan hubungan sosial, sehingga pendekatan edukatif berbasis dialog lebih mudah diterima. Pola-pola komunikasi lokal yang cenderung kolektif juga memberikan peluang bagi keberlanjutan dampak kegiatan sosialisasi, di mana peserta dapat menjadi agen informasi bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pemilu ini tidak hanya memberikan dampak instan, tetapi juga berpotensi menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) dalam jangka panjang.

Kegiatan sosialisasi pemilu merupakan upaya strategis yang menggabungkan perspektif akademik, nilai kemanusiaan, dan kebutuhan praktis masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk konkret pemberdayaan politik yang mendorong masyarakat Bone menjadi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Penguatan literasi politik melalui pendekatan humanis dan partisipatif diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis, tidak hanya untuk konteks Bone, tetapi juga sebagai model yang dapat direplikasi di wilayah lain.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat Kabupaten Bone tidak hanya diposisikan sebagai penerima materi sosialisasi pemilu, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan partisipatif ini dipilih karena lebih mampu menggali pengalaman, persepsi, dan kebutuhan masyarakat mengenai isu-isu kepemiluan, sehingga proses sosialisasi tidak berlangsung satu arah, tetapi menjadi ruang belajar bersama yang dialogis dan humanis. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, dimulai dari observasi awal hingga tahap evaluasi dampak kegiatan.

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan (*needs assessment*) yang dilakukan melalui komunikasi informal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan kelompok perempuan. Tahap ini penting untuk memahami konteks sosial Kabupaten Bone, terutama terkait tingkat pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu, tantangan akses informasi, serta isu-isu yang dianggap paling membingungkan oleh pemilih, seperti tata cara pencoblosan, mekanisme penetapan daftar pemilih, hingga isu disinformasi politik. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang struktur materi serta menentukan metode penyampaian yang efektif.

Tahap kedua adalah perencanaan kegiatan, yang meliputi penentuan lokasi pelaksanaan, penyusunan materi sosialisasi, serta penyusunan perangkat edukatif seperti leaflet, slide presentasi, dan panduan simulasi pemungutan suara. Materi disusun berdasarkan regulasi resmi penyelenggara pemilu, tetapi dikemas dengan bahasa yang lebih sederhana dan inklusif agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan. Pada tahap ini, tim pengabdian juga menyiapkan skenario interaksi, termasuk sesi tanya jawab, diskusi kelompok kecil, serta studi kasus yang relevan dengan situasi sosial di Kabupaten Bone.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang dilakukan dalam bentuk ceramah interaktif, dialog terbuka, dan simulasi proses pemungutan suara. Pendekatan ceramah interaktif memungkinkan penyampaian materi secara sistematis, namun tetap membuka ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan atau mengklarifikasi informasi yang sering menjadi sumber kesalahpahaman dalam pemilu. Dialog terbuka kemudian memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman pribadi, mengungkapkan kekhawatiran, atau membahas isu-isu yang berkembang di lingkungan mereka. Sementara itu, simulasi pemungutan suara dirancang agar peserta memperoleh gambaran konkret mengenai alur pemilu, mulai dari proses masuk TPS, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta yang sebelumnya merasa ragu atau khawatir melakukan kesalahan saat mencoblos.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan singkat dan klarifikasi individual, yaitu memberikan kesempatan bagi peserta yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam, termasuk kelompok pemilih pemula atau peserta yang belum pernah mengikuti pemilu. Pada tahap ini, tim pengabdian menyediakan sesi konsultasi personal yang memungkinkan peserta bertanya tanpa merasa sungkan. Pendekatan humanis ini sangat membantu dalam menciptakan suasana belajar yang hangat dan inklusif.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, dilakukan evaluasi melalui umpan balik lisan, observasi partisipatif, dan penilaian sederhana mengenai peningkatan pemahaman peserta. Evaluasi ini tidak hanya mengukur efektivitas kegiatan, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi pengembangan program sosialisasi pemilu di masa mendatang. Selain itu, dokumentasi kegiatan berupa foto, transkrip diskusi, dan catatan lapangan disusun untuk memperkaya analisis kualitas pelaksanaan kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memastikan bahwa sosialisasi pemilu berjalan secara komprehensif, komunikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan dialogis dan partisipatif terbukti mampu menjembatani kesenjangan informasi sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran politik yang lebih matang di kalangan masyarakat Kabupaten Bone. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan ruang belajar yang menghargai pengalaman, nilai, dan aspirasi masyarakat sebagai bagian integral dari proses demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Bone tepatnya pada 3 desa yaitu Desa Lampoko, Desa Parippung, dan Desa Kampuno. Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang setiap desa, sehingga keseluruhan peserta dari 3 desa adalah 90 orang. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilu di Kabupaten Bone memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pemahaman politik masyarakat serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses informasi kepegiluan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan materi secara teknis, tetapi juga membangun ruang dialog yang memungkinkan peserta berbagi pengalaman dan kegelisahan mengenai proses pemilu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan politik melalui pendekatan humanis dan partisipatif mampu meningkatkan literasi politik secara signifikan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu.





Gambar 2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Pemula

Salah satu temuan awal yang muncul dari kegiatan ini adalah adanya kesenjangan pemahaman yang cukup besar antara kelompok masyarakat yang sudah pernah berpartisipasi dalam beberapa kali pemilu dan kelompok masyarakat yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya, terutama pemilih pemula. Kelompok kedua ini menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu demokrasi, tetapi sering kali terhambat oleh minimnya informasi yang dapat mereka akses secara langsung. Pemilih muda di Bone umumnya bergantung pada arus informasi media sosial, yang tidak selalu memberikan pengetahuan faktual dan sering kali menyebarkan disinformasi politik (Muhtadi, 2021:88). Dalam dialog, beberapa peserta mengaku masih ragu terhadap prosedur pencoblosan dan takut melakukan kesalahan administratif yang dapat membuat suara mereka tidak sah. Kondisi ini menunjukkan urgensi pendidikan politik yang lebih terstruktur bagi pemilih pemula, terutama pada aspek teknis dan etika pemilu.

Temuan lain yang cukup signifikan muncul dari kelompok perempuan, terutama ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan mobilitas dan akses informasi. Di sejumlah desa, mereka mengaku bahwa informasi politik biasanya hanya diterima melalui pertemuan informal atau dari anggota keluarga laki-laki. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik memiliki dampak positif terhadap kualitas demokrasi karena mereka cenderung membawa perspektif yang lebih empatik dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga (Mulia, 2014:64). Kegiatan sosialisasi memberi ruang bagi para perempuan ini untuk bertanya tanpa rasa sungkan, terutama terkait bagaimana menentukan pilihan yang rasional, cara menilai rekam jejak calon, serta bagaimana menghadapi tekanan politik baik dari keluarga, lingkungan, maupun elite lokal. Respons antusias dari peserta perempuan memperkuat argumen bahwa kegiatan sosialisasi harus lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Dalam pelaksanaan simulasi proses pemungutan suara, peserta menunjukkan antusiasme tinggi. Simulasi ini meniru pola alur pemungutan suara di Tempat Pemungutan

Suara (TPS), mulai dari proses pendaftaran, verifikasi identitas, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Melalui simulasi ini, peserta dapat melihat secara langsung bagaimana mekanisme pemilu berjalan secara teknis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta yang sebelumnya tampak pasif menjadi lebih percaya diri setelah mengikuti simulasi. Beberapa peserta bahkan menyampaikan bahwa kegiatan ini membantu mereka memahami bahwa aturan di TPS sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Pendekatan praktis ini selaras dengan teori pembelajaran *experiential learning* yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam memperkuat pemahaman konsep (Kolb, 1984:41).

Selain memberikan pengetahuan teknis, kegiatan sosialisasi juga membuka ruang diskusi mengenai isu-isu publik yang berkembang di masyarakat. Topik yang paling sering dibahas adalah masalah politik uang, netralitas aparatur pemerintah, dan maraknya hoaks politik selama masa kampanye. Masyarakat Bone mengekspresikan kekhawatiran bahwa praktik-praktik tersebut dapat merusak integritas pemilu dan mengurangi kualitas demokrasi. Dalam sesi diskusi, tim pengabdian menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Robert A. Dahl (1998:37-38) yang menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan jika warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi politik serta kemampuan untuk terlibat dalam proses pengawasan. Interaksi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kritis yang cukup kuat, meskipun belum diimbangi dengan pengetahuan prosedural tentang mekanisme pelaporan pelanggaran.

Hasil lainnya terlihat dari evaluasi informal yang dilakukan pada akhir kegiatan. Peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami unsur-unsur dasar kepemiluan, seperti perbedaan antara KPU dan Bawaslu, mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), prosedur penghitungan suara, serta cara memeriksa keaslian informasi politik. Peningkatan ini terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali materi dan bertanya dengan kualitas pertanyaan yang lebih kritis. Evaluasi lisan mengonfirmasi bahwa metode yang digunakan khususnya dialog terbuka dan simulasi lebih efektif daripada metode ceramah tunggal. Hal ini menguatkan argumen bahwa pendidikan politik yang baik harus berangkat dari pengalaman sosial masyarakat serta memungkinkan peserta membangun pengetahuannya melalui proses dialogis (Dewey, 1916:87).

Kegiatan ini juga mengungkap bahwa masyarakat Kabupaten Bone memiliki aspirasi yang kuat untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses demokrasi. Banyak peserta yang menyampaikan keinginan agar kegiatan serupa dilakukan secara rutin, terutama menjelang pemilu. Mereka menilai kegiatan ini membantu mereka memahami bahwa pemilu bukan sekadar rutinitas politik lima tahunan, tetapi momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi kolektif masyarakat. Temuan ini menggambarkan adanya potensi untuk mengembangkan model pemberdayaan politik berbasis komunitas yang dapat dijalankan secara berkelanjutan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu.

Dari sisi dampak sosial, kegiatan ini turut memperkuat jaringan komunikasi antara akademisi dan masyarakat. Interaksi yang terjalin selama kegiatan menciptakan iklim kepercayaan yang penting dalam membangun kultur politik yang lebih sehat. Masyarakat merasa dihargai karena pendekatan yang digunakan bersifat dialogis, tidak menggurui, dan terbuka terhadap pengalaman lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan kritis Paulo Freire (2007:112) yang menekankan bahwa proses belajar harus berangkat dari realitas sosial peserta dan menghormati pengetahuan yang mereka miliki. Melalui relasi yang setara, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu membangun kepercayaan diri masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki dampak positif yang signifikan. Peningkatan literasi politik, terbukanya ruang diskusi, berkembangnya kesadaran kritis, serta meningkatnya kepercayaan diri peserta merupakan indikator penting keberhasilan program ini. Dampak-dampak tersebut memperkuat kesimpulan bahwa pendekatan humanis dan partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu dibandingkan pendekatan satu arah yang selama ini sering dilakukan lembaga penyelenggara.

Hasil kegiatan ini berkaitan dengan beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Devi dkk. (2023) kegiatan berupa sosialisasi bagi siswa/siswi SMK Al-UM yang memberikan pemahaman terkait pentingnya partisipasi dalam politik, baik dalam proses pemilu ataupun mengawal pelaksanaan pembangunan daerah dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Begitu juga Satria dkk. (2025) yang melakukan pendekatan edukatif dan interaktif berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Sementara Payong dan Buku (2025), melaksanakan sosialisasi dan pengisian kuesioner dengan hasil 95% masyarakat menjawab sudah memahami apa itu pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam pemilu. Hanya saja studi sebelumnya hanya menguji pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik, sementara kegiatan yang dilakukan selain memberikan pemahaman, juga memberikan pendampingan dan umpan balik sehingga daya kritis dan kesadaran masyarakat dapat lebih terbangun.

Dari aspek tantangan, Syahdanul dan Muhammad (2025) menjelaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengetahuan prosedural di kalangan pemilih muda, transformasi agensi politik masih bersifat simbolik dan terhambat oleh struktur *patronase*, ketimpangan digital, serta nilai kekerabatan *panngaderreng*. Diharapkan, melalui sosialisasi yang partisipatif dan inklusif, masyarakat akan semakin paham akan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi, serta mampu berperan menjadi pemilih yang kritis dan mengawasi secara aktif proses Pilkada (Nasution, 2024). Melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan di Kabupaten Bone, menjadi salah satu upaya mewujudkan harapan tersebut dengan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif dan humanis.

Kegiatan pengabdian ini memberikan pembelajaran penting bahwa masyarakat akan merespons lebih baik ketika mereka diberi ruang untuk berdialog, berefleksi, dan terlibat dalam pengalaman langsung. Model pengabdian seperti ini sangat potensial untuk

direplikasi di wilayah lain yang memiliki tantangan literasi politik serupa, sehingga dapat menjadi alternatif strategi pendidikan politik yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pemilu yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bone memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi politik dan kesadaran demokratis warga. Melalui pendekatan dialogis, partisipatif, dan humanis, kegiatan ini berhasil membangun ruang pembelajaran yang inklusif, di mana peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses diskusi, refleksi, dan simulasi kepemiluan. Interaksi yang terjalin antara tim pengabdian dan masyarakat menunjukkan bahwa pengetahuan politik akan lebih mudah diserap ketika disampaikan dengan metode yang menghargai pengalaman sosial, nilai budaya, dan kebutuhan nyata peserta. Kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial. Melalui penerapan Tri Dharma, pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkaya wawasan akademisi mengenai dinamika politik lokal. Keterlibatan langsung dengan masyarakat Bone menunjukkan bahwa pendidikan politik yang humanis dapat menjadi strategi yang berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat akar rumput. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi politik bukan hanya tentang distribusi informasi, tetapi tentang proses pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat memahami, menginternalisasi, dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Model sosialisasi seperti ini layak direplikasi di wilayah lain, terutama daerah yang menghadapi tantangan serupa dalam akses informasi dan rendahnya partisipasi politik. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendekatan edukatif yang dialogis dan menghargai kemanusiaan, pemilu tidak hanya menjadi agenda rutin lima tahunan, tetapi momentum penting untuk membangun demokrasi yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan dukungan finansial dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta kepada pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan literasi politik masyarakat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, A. (2010). *Demokrasi dan civil society*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Devi, N. U. K., Rismanda, A., & Purwanto, M. N. A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Kalangan Remaja Di Smk Al-Um Tegalrejo Dalam Kurangnya Pemahaman Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(4), 622-628.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. New York: Macmillan.
- Freire, P. (2007). *Pendidikan kaum tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Kelibay, I., Kamaluddin, K., Nurjannah, S., Kadir, M. A. A., Rusdi, R., Refra, M. S., ... & Boinauw, I. (2023). Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 442-449.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. New Jersey: Prentice Hall.
- Muhtadi, B. (2021). *Populisme, politik identitas, dan demokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Mulia, S. M. (2014). *Perempuan dan politik*. Jakarta: Kompas.
- Nasution, K. U. U. (2024). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Siabu Menjelang Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. *Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 33-39.
- Payong, O. D., & Buku, K. R. (2025). Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Desa Ndondo. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(1), 1-7.
- Rambe, A. P., Zulkarnain, I., & Ridho, H. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Labuhan Batu 2020 melalui media sosial. *Perspektif*, 12(2), 698-711.
- Riyadh, R., Ayuni, R. D., & Wafa, M. A. (2025). Pemanfaatan Situs Website Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai Sarana Informasi Publik. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(2), 917-923.
- Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., ... & Bachtera, R. A. (2024). Analisis pengaruh terpaan media sosial TikTok terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024: Pendekatan kuantitatif. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1255-1264.

- Satria, I. G. S., Fikri, S., Kaniska, A. G. I., & Suryanto, R. D. (2025). Peningkatan Kesadaran Politik Melalui Sosialisasi Pemilih Pemula di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 7-12.
- Syahdanul, F., Muhammad, M. (2025). Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 468-482.
- Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H. (2021). Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak. *Perspektif*, 10(2), 627-643.
- Umma, W. P., & Ahmad, N. (2025). Peran Media Sosial sebagai Medium untuk Memaksimalkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Jombang. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 7(1), 122-135.
- Yanur, M., Iskandar, D., Zulfauzan, R., Putra, M., Hutapea, C., Panjika, Y. P., ... & Sirait, M. (2025). Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(2), 56-67.